

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Memahami pendidikan Islam tidak semudah mengurai kata Islam dan pendidikan, karena selain sebagai predikat, Islam juga merupakan satu substansi dan subjek penting yang cukup kompleks. Karenanya, untuk memahami pendidikan Islam berarti kita harus melihat aspek utama misi agama Islam yang diturunkan kepada umat manusia dari sisi pedagogis. Islam sebagai ajaran yang datang dari Allah sesungguhnya merefleksikan nilai-nilai pendidikan yang mampu membimbing dan mengarahkan manusia sehingga menjadi manusia sempurna. Islam sebagai agama universal telah memberikan pedoman hidup bagi manusia menuju kehidupan bahagia, yang pencapaiannya bergantung pada pendidikan. Pendidikan merupakan kunci penting untuk membuka jalan kehidupan manusia.¹ Firman Tuhan dalam Al-Qur'an:

الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَىٰ لَهُمْ وَحَسُنَ مَا أَجْرُهُمُ

Artinya : “Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik”. (QS. Ar-Ra'd:29)²

Dengan demikian, Islam sangat berhubungan erat dengan pendidikan. Hubungan antara keduanya bersifat *organis-fungsional*; pendidikan berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan Islam, dan Islam menjadi kerangka dasar

¹ Musthofa Rahman., *Pendidikan Islam dalam Perspektif Al-Qur'an*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001, hlm. 56.

² R.H.A. Soenarjo, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Depag RI, Jakarta, 2000, hlm. 373.

pengembangan pendidikan Islam, serta memberikan landasan sistem nilai untuk mengembangkan berbagai pemikiran tentang pendidikan Islam.³

Islam menyediakan dasar-dasar untuk membangun sistem pendidikan yang sarat dengan sistem nilai. Dengan dasar-dasar itu diharapkan lahir sistem pendidikan yang mendukung, menjiwai, memberi corak dan bentuk proses pendidikan yang ideal serta bisa diterapkan dalam berbagai lembaga pendidikan.⁴ Untuk itu, pendidikan pada dasarnya merupakan sarana strategis untuk meningkatkan potensi bangsa agar mampu berkiprah dalam tataran yang lebih global. Selain itu, pendidikan sebagai *investment in people*, untuk mengembangkan individu dan masyarakat, dan sisi lain pendidikan merupakan sumber untuk pertumbuhan ekonomi.⁵

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang diperbarui dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, maka pengelolaan teknis operasional penyelenggaraan pendidikan dasar di Indonesia menjadi tanggung jawab dan kewenangan pemerintah kabupaten/kota, kecuali pengelolaan RA/MI/MTs. Tanggung jawab pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pendidikan adalah menetapkan standar penyelenggaraan pendidikan dasar, antara lain mencakup standar isi kurikulum, standar kompetensi lulusan, standar pengelolaan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan fasilitas belajar, standar pembiayaan, serta standar penilaian proses dan hasil belajar peserta didik.⁶

³ Hery Noer Aly., *Ilmu Pendidikan Islam*. Logos Wacana Ilmu, 1999, hlm. 2.

⁴ Tedi Priatna., *Reaktualisasi Paradigma Pendidikan Islam*. Pustaka Bani Quraisy, Bandung, 2011, hlm. 2.

⁵ Hadiyanto. *Mencari Sosok Desentralisasi Manajemen Pendidikan di Indonesia*. PT. Rineka Cipta. Jakarta, 2011, hlm. 29.

⁶ Zainal Arifin, *Pengembangan Manajemen Mutu Kurikulum Pendidikan Islam*. Diva Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 11.

Bila sebelumnya manajemen pendidikan merupakan wewenang pusat (sentralisasi), maka dengan berlakunya undang-undang tersebut, kewenangan itu dialihkan ke pemerintah kota dan kabupaten atau yang dikenal dengan istilah desentralisasi.⁷ Desentralisasi merupakan penyerahan urusan pemerintah kepada daerah, sehingga wewenang dan tanggung jawab sepenuhnya menjadi tanggung jawab daerah, termasuk di dalamnya penentuan kebijakan perencanaan, pelaksanaan, maupun yang menyangkut segi-segi pembiayaan aparatnya. Ranis menyebut sistem seperti ini sebagai devolusi (*devolution*), yaitu penyerahan kekuasaan (*power*) oleh pemerintah pusat kepada pengambil keputusan di tingkat daerah.⁸

Kemudian sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, salah satu standar yang harus dikembangkan adalah standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada suatu pendidikan untuk mencapai kompetensi lulusan. Standar proses berisi kriteria minimal proses pembelajaran pada suatu pendidikan dasar dan menengah di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar proses meliputi perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien.⁹

⁷ E Mulyasa, E. *Manajemen Berbasis Sekolah*. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2010, hlm. 6.

⁸ Faisal Jalal dan Supriyadi, Dedi (editor). *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*. Adicita Karya Nusa. Yogyakarta, 2011, hlm. 122.

⁹ Rusman, *Model-Model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru*. PT. Rajawali Pers. Jakarta, 2010, hlm. 3.

Salah satu imbas dari adanya kebijakan otonomi daerah adalah munculnya otonomi pendidikan. Menurut Djohar, otonomi daerah memberikan konsekuensi upaya peningkatan kualitas pendidikan menjadi tanggung jawab daerah. Namun demikian, tidak berarti daerah harus terlalu banyak terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan. Daerah dapat memikirkan hal-hal, seperti mencari model yang cocok dengan pendidikan di daerahnya; memfasilitasi dana, prasarana, dan sarana pendidikan; serta menyiapkan pedoman pendidikan bagi sekolah yang membutuhkan. Sedangkan penyelenggaraan pendidikan sepenuhnya diserahkan kepada sekolah masing-masing, dengan membentuk Dewan Pertimbangan Sekolah (DPS) yang bertugas memikirkan kemajuan sekolah. DPS sendiri dapat terdiri atas kepala sekolah, guru, peserta didik, orang tua peserta didik, dan masyarakat yang memiliki kewajiban untuk menentukan segala sesuatu yang diperlukan sekolah. Dan, kepala sekolah bertugas melaksanakan kebijakan yang telah dirumuskan oleh DPS. Disini, garis struktural kepala sekolah lebih dominan terkait dengan kegiatan administrasi. Struktur organisasi yang demikian dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekuasaan kepala sekolah dan pimpinan di atasnya dalam menentukan kebijakan pendidikan di setiap sekolah.¹⁰

Otonomi pendidikan memberikan peluang bagi sekolah, khususnya guru untuk melakukan manajemen pengembangan pembelajaran dan kurikulum sesuai dengan konteks sekolah masing-masing. Hal ini dilakukan agar sekolah

¹⁰ Djohar, *Pengembangan Pendidikan Nasional Menyongsong Masa Depan*. Grafika Indah, Yogyakarta, 2010, hlm. 230.

dapat mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan peserta didik sesuai dengan lingkungannya.¹¹ Sebagaimana saat ini dunia pendidikan kita telah menjalankan kurikulum 2013. Konsep kurikulum 2013 adalah kurikulum berbasis kompetensi. Kompetensi tersebut dinyatakan dalam bentuk Kompetensi Inti (KI) yang selanjutnya dirinci lebih lanjut ke dalam Kompetensi Dasar (KD). Kompetensi inti terdapat empat kompetensi, salah satunya adalah sikap spiritual yang harus termuat dalam setiap mata pelajaran di setiap jenjang pendidikan. Sikap spiritual bertujuan untuk membentuk peserta didik yang beriman dan bertakwa.¹²

Pelaksanaan kurikulum 2013 dibutuhkan profesionalisme guru, dimana guru merupakan sosok yang memiliki peranan sangat menentukan dalam proses pengembangan pembelajaran. Oleh karena itu, untuk mewujudkan kesuksesan dalam proses pengembangan pembelajaran, guru harus melengkapi dirinya dengan berbagai aspek yang mendukung ke arah keberhasilan. Seorang guru yang melaksanakan tugasnya hanya berdasarkan tradisi atau kebiasaan yang telah dijalani selama bertahun-tahun, tanpa mempertimbangkan berbagai ketrampilan teoretis maupun teknis yang mendukung profesionalitasnya, tentu akan memberikan hasil pembelajaran yang kurang sesuai dengan harapan. Sebaliknya, guru yang terus-menerus berusaha meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya, tentu akan menghasilkan proses pembelajaran yang jauh lebih baik.¹³

¹¹ Zainal Arifin, *Op.Cit.* hlm. 13.

¹² E Mulyasa, *Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung, 2013, hlm. 174-175.

¹³ Ngainun Naim,dan Patoni, Achmad, *Desain Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hlm. 1.

Kehadiran manajemen dalam organisasi adalah untuk melaksanakan kegiatan agar suatu tujuan dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Kegiatan proses pencapaian tujuan tersebut yaitu berupa tindakan-tindakan yang mengacu kepada fungsi manajemen. Manajemen pengembangan program pembelajaran ini sama halnya proses manajemen sebagaimana menurut teori G.R. Terry, sebagai suatu proses yang terdiri dari tindakan perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*) yang dilaksanakan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber daya lainnya.¹⁴ Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa dalam proses pencapaian tujuan dimulai dari tindakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dikerjakan dengan mengerahkan dan memanfaatkan sumber daya yang ada.

Berkaitan dengan posisi dan peranan guru dalam proses pengembangan program pembelajaran, aspek substansial yang penting untuk direnungkan adalah; bagaimana guru memberi kemungkinan bagi peserta didik agar terjadi proses pembelajaran secara efektif, atau dapat mencapai hasil sesuai dengan tujuan. Dengan demikian, sebuah proses pembelajaran akan dapat berlangsung secara maksimal sebagaimana diharapkan, atau justru berlangsung tanpa hasil, dipengaruhi oleh sosok guru. Pada diri guru kunci utama berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan dalam proses pembelajaran.¹⁵

¹⁴ Ali Imron, Ali, *Manajemen Pendidikan*. Universitas Negeri Malang, Malang, 2013, hlm. 6.

¹⁵ Ngainun Naim, dan Patoni. *Op.Cit.*, hlm. 2.

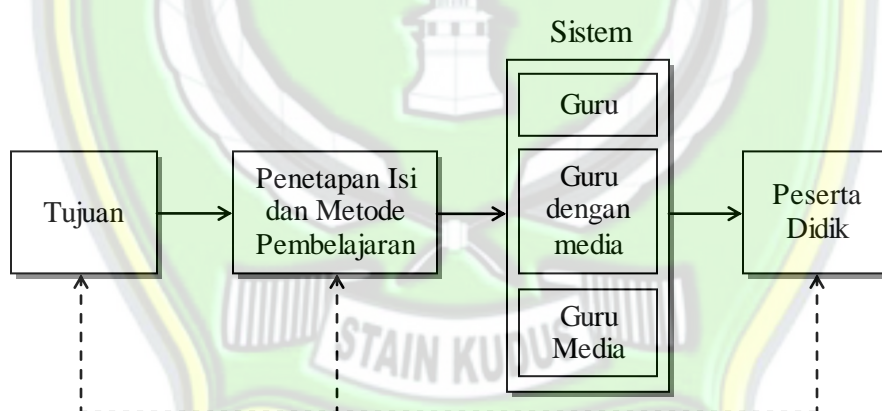
Menurut Ali, ada beberapa aspek yang harus dipertimbangkan jika seorang guru ingin melaksanakan pengembangan proses pembelajaran sebagaimana diharapkan. *Pertama*, guru harus mempunyai pegangan asasi tentang mengajar dan dasar-dasar teori belajar. *Kedua*, guru harus dapat mengembangkan sistem pengajaran. *Ketiga*, guru harus mampu melakukan proses pembelajaran yang efektif. *Keempat*, guru harus mampu melakukan penilaian hasil belajar sebagai dasar umpan balik seluruh proses pembelajaran yang ditempuh.¹⁶

Dengan demikian seorang guru yang memegang peranan pokok dalam manajemen pengembangan program pembelajaran memiliki tiga macam tugas utama. *Pertama*, membuat perencanaan pembelajaran. Walaupun kegiatan pembelajaran telah menjadi tugas rutin yang dijalani dari waktu ke waktu, tetapi perencanaan tetap harus dibuat. Adanya perencanaan membuat guru memiliki kerangka dasar dan orientasi yang lebih konkret dalam pencapaian tujuan. Perencanaan pembelajaran ini setidaknya mencakup; (1) tujuan yang hendak dicapai; (2) bahan pelajaran yang dapat mengantarkan peserta didik mencapai tujuan; (3) bagaimana proses pembelajaran yang akan diciptakan untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien; dan (4) bagaimana menciptakan dan menggunakan alat untuk mengetahui atau mengukur apakah tujuan tercapai atau tidak. *Kedua*, melaksanakan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran seharusnya mengacu kepada perencanaan. Namun demikian seringkali apa yang direncanakan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal.

¹⁶ Mohammad Ali, *Guru dalam Proses Belajar Mengajar*. Cet. 12. Sinar Baru Algesindo, Bandung, 2003, hlm. 1.

Ketiga, memberikan *feedback* (umpan balik). Sebuah proses pembelajaran akan senantiasa berada dalam situasi yang ideal jika terus-menerus terjadi umpan balik. Adanya umpan balik berfungsi sebagai sarana untuk membantu memelihara minat dan antusiasme peserta didik dalam melaksanakan pembelajaran. Hal ini dapat dilakukan melalui evaluasi.¹⁷

Dalam proses pembelajaran, dikenal berbagai pola pembelajaran. Pola pembelajaran adalah model yang menggambarkan kedudukan serta peran guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti.¹⁸ Pola pembelajaran pendidikan agama Islam dan Budi pekerti yang dikembangkan dan dilaksanakan di SMP Negeri 2 dapat diamati pada diagram berikut:



Gambar 1.1.

Arus Balik dan Evaluasi

Dari diagram tersebut tampak sekali bahwa pola pembelajaran dapat dijalani melalui interaksi antara guru, guru media (media berfungsi guru), dan guru dengan media dengan peserta didik. Sumber belajar bagi peserta didik

¹⁷ Ngainun Naim, dan Patoni, Achmad. *Op.Cit.*, hlm. 2-3.

¹⁸ Muhaimin, *Paradigma Pendidikan Islam, Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah*. Rosdakarya, Bandung, 2002, hlm. 158.

bisa berupa guru, media yang dirancang oleh guru dan guru dengan media yang merupakan suatu sistem dalam proses pembelajaran. Pengembangan program pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, sebagaimana tujuan utamanya yaitu akan mengantarkan generasi Islam yang beriman bertaqwa berahlaqul karimah.

Manajemen pengembangan pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMP Negeri 2 Kudus yang dilaksanakan, diharapkan akan mempengaruhi kepribadian, perilaku, dan pengetahuan peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran. Artinya, berhasil tidaknya proses pembelajaran akan sangat ditentukan oleh manajemen pengembangan pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMP Negeri 2 Kudus. Disamping hal tersebut ada sinyalemen di masyarakat bahwa SMP 2 Kudus dikenal sebagai SMP Negeri yang dikenal Islami. Berdasarkan gambaran tersebut, bahwa kurikulum 2013 merupakan upaya mewujudkan pendidikan bermutu dalam menghadapi tantangan saat ini yang berdampak pada moral peserta didik. Kurikulum 2013 sejalan dengan pendidikan spiritual, dengan mengintegrasikan sikap spiritual dalam komponen pembelajaran. Hal ini menjadikan peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul **“Manajemen Pengembangan Program Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMP Negeri 2 Kudus Tahun Pelajaran 2014/2015”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas muncul permasalahan pokok yang akan dicari jawabannya lebih lanjut. Permasalahan-permasalahan itu adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perencanaan pengembangan program pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMP Negeri 2 Kudus?
2. Bagaimana pelaksanaan pengembangan program pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMP Negeri 2 Kudus?
3. Bagaimana proses evaluasi dalam pengembangan program pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMP Negeri 2 Kudus?
4. Bagaimana proses tindak lanjut dalam pengembangan program pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMP Negeri 2 Kudus?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang diangkat, maka tujuan penulisan tesis ini yaitu :

- a. Untuk mendeskripsikan perencanaan pengembangan program pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMP Negeri 2 Kudus.
- b. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan pengembangan program pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMP Negeri 2 Kudus.
- c. Untuk mendeskripsikan proses evaluasi dalam pengembangan program pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMP Negeri 2 Kudus.

- d. Untuk mendeskripsikan proses tindak lanjut dalam pengembangan program pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMP Negeri 2 Kudus.

2. Manfaat Penelitian

Temuan-temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak sebagai berikut :

- a. Secara praktis akademik, berguna menambah khasanah ilmu pengetahuan serta memberi masukan dalam rangka penyusunan teori atau konsep-konsep baru terutama untuk pengembangan pemikiran dalam memecahkan permasalahan yang berhubungan dengan manajemen pengembangan pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti.
- b. Secara filosofis akademik, berguna dalam memberikan sumbangsih terhadap perkembangan ilmu pendidikan, terutama yang berkaitan dengan manajemen pengembangan pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMP Negeri 2 Kudus.
- c. Secara sosial akademik, berguna sebagai masukan bagi para guru di SMP Negeri 2 Kudus bahwa keberhasilan dalam proses belajar mengajar ditentukan oleh manajemen pembelajaran yang berkualitas.
- d. Secara konseptual, berguna bagi penemuan konsep baru tentang manajemen pengembangan pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMP Negeri 2 Kudus.

D. Kerangka Pemikiran

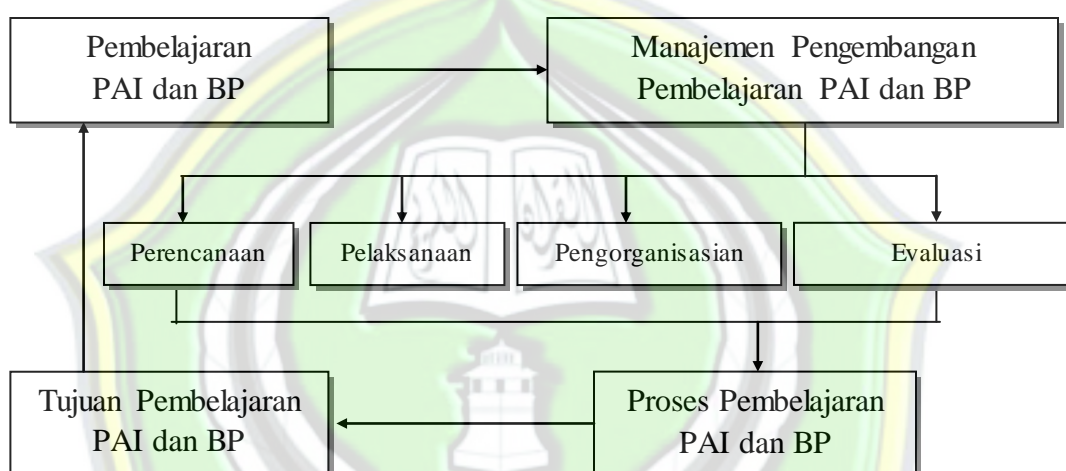
Merumuskan kerangka pemikiran penelitian ini ditempuh melalui telaah berbagai konsep dan teori yang berkaitan dengan masalah penelitian. Manajemen pengembangan pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti adalah bagaimana menyampaikan pesan-pesan dalam proses pembelajaran kepada peserta didik untuk membentuk kompetensi mereka sesuai dengan karakteristik dan kemampuan masing-masing.

Otonomi dalam mengelola pembelajaran merupakan potensi bagi sekolah untuk meningkatkan kinerja guru. Oleh karena itu, guru juga berperan sebagai seorang manajer yang mengelola pembelajaran dengan baik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dalam proses manajemen (pengelolaan), guru Pendidikan Agama Islam terlibat fungsi-fungsi pokok yang ditampilkan oleh seorang manajer, yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan evaluasi (*controlling*) dalam pembelajaran.¹⁹ Oleh karena itu, manajemen diartikan sebagai proses merencanakan, mengorganisasi, memimpin dan mengendalikan upaya organisasi dengan segala aspeknya agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien.

Kemampuan guru dalam menerapkan manajemen/pengelolaan pembelajaran yang dimaksud adalah keterampilan menyusun rencana pengajaran, keterampilan melaksanakan prosedur mengajar dan keterampilan melaksanakan hubungan antar pribadi. Lebih spesifik lagi adalah kemampuan

¹⁹ Martinis Yamin dan Maisahlm., *Manajemen Pembelajaran Kelas (Strategi Meningkatkan Mutu Pembelajaran)*, Gaung Persada Press, Jakarta, 2009, hlm. 2.

guru yang terkait dengan tugas pokok guru, yaitu menyusun program pengajaran, menyajikan program pengajaran, melaksanakan evaluasi belajar, menganalisis hasil evaluasi belajar serta menyusun dan melaksanakan program perbaikan dan pengayaan terhadap peserta didik yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun kerangka pikiran dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:



Gambar 1.2 Pola Pikir Penelitian

Gambar di atas menunjukkan arah adanya siklus (perputaran) dari satu item pemikiran ke item pemikiran berikutnya yang mempunyai kedudukan dan hubungan erat yang tidak dapat dipisahkan. Item program pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dalam rangka meningkatkan keimanan, pemahaman, penghayatan, dan pengamalan peserta didik tentang agama Islam. Sehingga menjadi manusia muslim yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi. Untuk membuat inovasi pembelajaran

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti yang menarik dan sesuai dengan psikologis anak dibutuhkan analisis dan pemikiran tentang materi, metode, alat dan sarana prasarana, evaluasi dan sebagainya. Untuk itu pula dibutuhkan adanya suatu manajemen pengembangan pembelajaran yakni yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi guna tercapainya tujuan pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti secara efektif dan efisien.

